

UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Mihda Madaliyah¹, Syifa Rohmah²

^{1,2}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: mihda.madaliyah@mhs.uingusdur.ac.id¹, syifa.rohmah@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan papan. Angka kemiskinan di Indonesia juga terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian dan prioritas tinggi untuk penanganan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Harapan dengan adanya kebijakan, dapat terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: kemiskinan, upaya, kebijakan.

ABSTRACT: Poverty is a condition where a person is unable to fulfill his life needs, whether for clothing, food or shelter. The poverty rate in Indonesia is also quite high. Therefore, the government needs to give high attention and priority to handling poverty problems in Indonesia. This research is a type of descriptive qualitative research with literature study. Based on the causes, poverty is divided into three, namely natural poverty, structural poverty and cultural poverty. It is hoped that with the policy, there can be a reduction in the poverty rate in Indonesia.

Keywords: poverty, effort, policy.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, kebijakan pembangunan terkadang juga memberikan dampak negatif, seperti munculnya kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang biasa terjadi di negara berkembang, seperti yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan makan ataupun kebutuhan non makan (Nafi'ah, 2021). Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius dalam suatu negara karena menimbulkan berbagai dampak negatif dan berdampak besar terhadap negara, termasuk menghambat pertumbuhan perekonomian negara. Selain itu, angka kemiskinan di Indonesia juga terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian dan prioritas tinggi untuk penanganan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Permasalahan kemiskinan juga merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, dikarenakan masalah kemiskinan muncul akibat adanya ketidakadilan kebijakan sistem ekonomi dan politik bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan akses bagi mereka. Kemiskinan juga merupakan suatu kondisi yang menggambarkan minimnya pendapatan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan buruknya kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses bagi masyarakat miskin untuk menerima layanan yang mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga mereka terpaksa hidup dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya (Rohmi et al., 23 C.E.).

Menyadari hal tersebut, penelitian terkait upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting. Masyarakat harus mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan dan

dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari masalah kemiskinan sendiri. Kemudian masyarakat juga perlu mengetahui tentang kebijakan-kebijakan dan program apa saja yang harus diambil sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan atau menurunkan angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah studi literatur/pustaka. Data yang dijadikan penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal, artikel dan buku yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, maupun kebutuhan papan. Menurut Mubyarto, kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana dalam kehidupan penduduk tersebut merasakan serba kekurangan akibat rendahnya pendapatan yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan produktivitas, lemahnya nilai produksi, serta terbatasnya kesempatan bekerja (Arifin, 2020).

Pengukuran angka kemiskinan di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui penetapan nilai standar kebutuhan minimum, baik kebutuhan pangan dan non pangan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batasan untuk membedakan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin atau penduduk mampu. Garis batas tersebut disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Dengan kata lain, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki jumlah pengeluaran rata-ratanya berada di bawah garis kemiskinan.

Terdapat tiga indikator kemiskinan yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar. Pertama, Head Count Index (HCI – P0) yaitu presentase jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) yaitu rata-rata kesenjangan jumlah pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika nilai indeks semakin tinggi, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) yaitu Gambaran terkait penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika nilai indeks meningkat, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat (Septiadi & Nursan, 2020).

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dilihat dari kondisi awalnya memang miskin. Kemiskinan pada golongan ini dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan, dan mereka hanya mendapatkan pendapatan yang sangat rendah. Kemiskinan ini juga dapat disebabkan karena mengalami cacat, sakit, usia lanjut, dan bencana alam. Dengan begitu, seringkali kemiskinan natural ini terjadi secara turun temurun (Nafi'ah, 2021).

Selanjutnya kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang terjadi pada individu miskin yang dikarenakan struktur social dalam masyarakat, seperti adanya batasan hak-hak mereka dalam mengakses sumber ekonomi yang telah tersedia. Biasanya golongan tersebut memiliki kesadaran terhadap kehidupan ekonominya yang berbeda dari

masyarakat lain yang lebih dianggap mampu, sehingga kekuasaannya berada di bawah individu yang kaya. Contohnya, para petani yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan seseorang yang dapat memberikannya modal atau lahan untuk digarap. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) adalah kemiskinan yang dipandang melalui sudut pandang budaya, di mana disebabkan adanya pola perilaku, sikap mental, dan pikiran yang tidak mampu menghadapi dan mengikuti perubahan untuk kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Biasanya budaya ini muncul karena adanya rasa minder, malas, boros dan tidak disiplin pada individu untuk meraih kesuksesan. Kebudayaan yang seperti inilah yang banyak terjadi di Indonesia. Kemiskinan kultural pada umumnya ditemukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih senditif pada status social, tetapi kurang adanya kesadaran kelas (Arifin, 2020).

3.2 Upaya Pengentasan Kemiskinan

Adanya ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kesenjangan, di mana kebijakan pemerintah tidak memihak penduduk miskin. Sehingga diperlukan adanya kebijakan oleh pemerintah daerah yang terfokus untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui alternatif kebijakan dan program untuk masyarakat miskin. Pemerintah daerah memberikan dua strategi utama, yaitu dengan meningkatkan pendapatan seperti dengan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin yang mempunyai kemampuan dalam memperoleh hasil di berbagai kegiatan. Strategi yang kedua, yaitu dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti kepentingan Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur yang memudahkan kegiatan social ekonomi. Dua strategi utama tersebut dapat dijalankan melalui kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan/kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan perlindungan social.

Untuk menjalankan dua strategi utama, diperlukan adanya konsistensi penyesuaian antara kebijakan dan program dalam konteks makro dan mikro, baik secara strategis ataupun secara operasional. Selain itu, diperlukan pula jaminan kebijakan yang mempertimbangkan suatu Keputusan yang adil dan tidak membatasi akses hak-hak pada masyarakat miskin. Kebijakan makro yang strategis dilakukan dengan mengatur kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif dengan cara, seperti memperluas kesempatan, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas, dan memberikan perlindungan social terhadap masyarakat miskin. Secara operasional, kebijakan makro tersebut dilakukan dengan orientasi kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan untuk kebijakan mikro yang strategis dilakukan melalui dukungan pengembangan program dan regulasi pengentasan kemiskinan yang konsisten dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam tingkat makro operasional. Kebijakan mikro operasional akan lebih mengarahkan pada kegiatan langsung dengan masyarakat miskin. Dalam kebijakan mikro operasional ini, mengutamakan cara penyampaian dan penentuan kelompok sasaran yang tepat dan akurat.

Program yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan perluasan kesempatan kerja. Di Indonesia, kesediaan lowongan pekerjaan atau lapangan kerja sangat terbatas, melihat jumlah penduduk di Indonesia yang melebihi lapangan kerjanya. Terlebih lapangan kerja yang tersedia memberikan berbagai kualifikasi. Bagi masyarakat miskin, terbatasnya akses pendidikan sangat mempengaruhi dalam mencari pekerjaan, serta dibutuhkannya pengalaman kerja dan keahlian tertentu sebagai kualifikasinya. Jadi, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat miskin sangat terbatas. Sehingga pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas usaha untuk masyarakat miskin melalui

pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, mengembangkan industrirumah tangga, memberikan perlindungan dan dukungan, memberikan modal usaha yang berasal dari pemerintah, memberikan hak dan jaminan untuk masyarakat miskin dalam berusaha, serta memberikan fasilitas yang memadai.

Kedua, melalui kebijakan dan program peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Program ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat miskin mampu bekerja secara produktif demi memperjuangkan kepentingan dan kehidupannya. Kebijakan yang dapat dilakukan, di antaranya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti kebutuhan pokok dan pelayanan pendidikan, Kesehatan, dan air bersih; peningkatan partisipasi pendidikan jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, baik dengan jalur formal ataupun non formal; peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun berbagai kebijakan dan program yang memihak masyarakat miskin; peningkatan kapasitas pelayanan public dan peran perempuan dalam proses pembangunan yang adil; dan peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan yang setara dan adil.

Ketiga, melalui kebijakan dan program jaminan perlindungan sosial. Dalam pengupayaan ini, pemerintah mengarahkan kebijakan kepada peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum untuk anak terlantar; pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan untuk masyarakat paling miskin dan penduduk usia lanjut; peningkatan sistem perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan; peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja untuk anak terlantar; dan peningkatan perlindungan pada perempuan dari berbagai tindakan kekerasan dan kriminal lainnya.

Dengan adanya berbagai kebijakan dan program yang diberikan oleh pemerintah, harapannya angka kemiskinan di Indonesia dapat terjadi penurunan, agar terciptanya masyarakat yang Makmur dan Sejahtera, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Sudarwati, 2009).

4. KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana dalam kehidupan penduduk tersebut merasakan serba kekurangan akibat rendahnya pendapatan yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan produktivitas, lemahnya nilai produksi, serta terbatasnya kesempatan bekerja. Angka kemiskinan di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui penetapan nilai standar kebutuhan minimum, baik kebutuhan pangan dan non pangan sebagai batasan untuk membedakan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin, yang disebut garis kemiskinan (GK). Maka, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki jumlah pengeluaran rata-ratanya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program. Pemerintah daerah memberikan dua strategi utama, yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar. Strategi utama tersebut dijalankan melalui kebijakan-kebijakan, seperti perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan/kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan perlindungan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, J. (2020). Budaya dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Sosio*

Informa, 6(02).

Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02).

Rohmi, M. L., Pratiwi, D., & Ramadhani, A. A. (23 C.E.). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kaitannya dengan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 22(2).

Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1).

Sudarwati, N. (2009). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. INTIMEDIA.